

**PENGARUH FAKTOR PENDORONG PERILAKU DAN
PENILAIAN KARAKTERISTIK KEBIJAKAN TERHADAP
MINAT MENGGUNAKAN *E-PROCUREMENT* DAN
PENGUNAAN *E-PROCUREMENT* TERHADAP KINERJA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)
DI KABUPATEN OGAN ILIR**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Magister Sains (M.Si)

Pada

Program Studi Magister Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UNIVERSITAS SRIWIJAYA



Oleh :

DETA HELISA NOVA

NIM 07012682327024

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Pengaruh Faktor Pendorong Perilaku Dan Penilaian Karakteristik Kebijakan Terhadap Minat Menggunakan E-Procurement Dan Penggunaan E-Procurement Terhadap Kinerja (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di Kabupaten Ogan Ilir

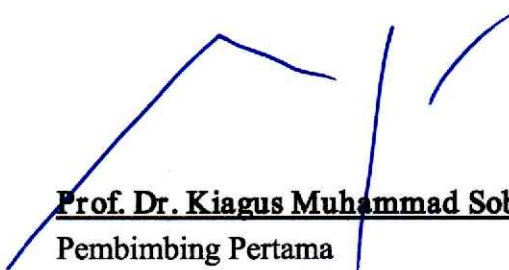
Nama Mahasiswa : Deta Helisa Nova


NIM : 07012682327024

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik

Menyetujui,


Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
Pembimbing Pertama


Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, M.M.
Pembimbing Kedua

Mengetahui,

Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sriwijaya


Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.
NIP 19780512 200212 1 003

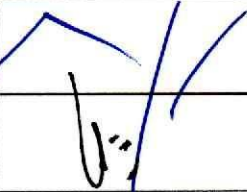
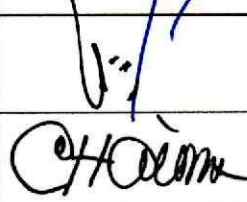
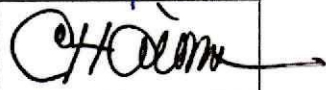
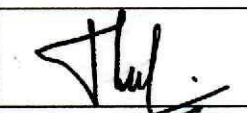




Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP 19660122 199003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Tesis : Pengaruh Faktor Pendorong Perilaku Dan Penilaian Karakteristik Kebijakan Terhadap Minat Menggunakan E-Procurement dan Penggunaan E-Procurement Terhadap Kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di Kabupaten Ogan Ilir

Nama Mahasiswa : Deta Helisa Nova
NIM : 07012682327024
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik
Tanggal Ujian : 02 Januari 2025

No	Nama Dosen Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.	Ketua	
2	Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, M.M.	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS.	Anggota	
4	Prof. Dr. Sriati, M.S.	Anggota	
5	Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.	Anggota	
6	Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Palembang, Januari 2025
Menyetujui,
Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik



Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.
NIP 19780512 200212 1 003

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deta Helisa Nova
NIM : 07012682327024
Tempat / Tanggal lahir : Baturaja, 22 November 1992
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik
Judul Tesis : Pengaruh Faktor Pendorong Perilaku Dan Penilaian Karakteristik Kebijakan Terhadap Minat Menggunakan *E-Procurement* Dan Penggunaan *E-Procurement* Terhadap Kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di Kabupaten Ogan Ilir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, Januari 2025

Yang Menyatakan,



DETA HELISA NOVA
NIM. 07012682327024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deta Helisa Nova
NIM : 07012682327024
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik. **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non exclusive Royalty - Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PENGARUH FAKTOR PENDORONG PERILAKU DAN PENILAIAN KARAKTERISTIK KEBIJAKAN TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN *E-PROCUREMENT* DAN PENGGUNAAN *E-PROCUREMENT* TERHADAP KINERJA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) DI KABUPATEN OGAN ILIR”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palembang
Pada Tanggal : Januari 2025
Yang Menyatakan



DETA HELISA NOVA
NIM. 07012682327024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

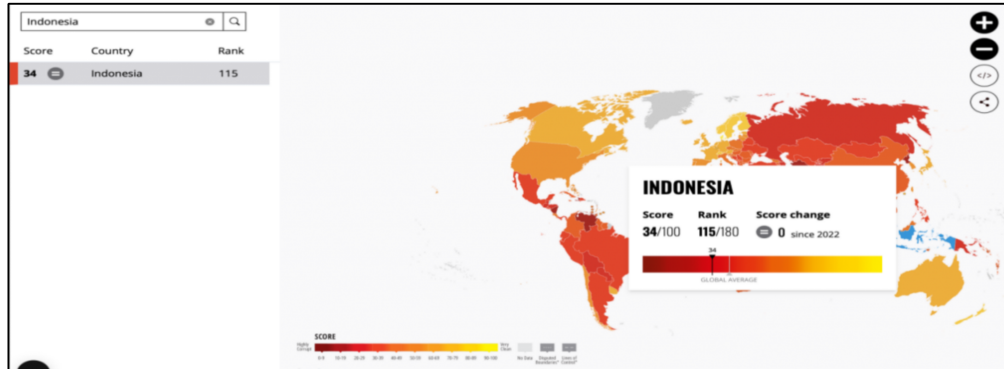
Revolusi industri keempat, melibatkan transformasi digital melalui penggabungan dunia fisik dan digital, termasuk peningkatan volume data, kemampuan analitik yang maju, dan interaksi baru antara manusia dan mesin (Gilchrist, 2016). Menurut *Tech for Society* (2021), perkembangan teknologi yang terus menerus tersebut telah memberikan dampak mendalam pada masyarakat, mengubah cara berbisnis, bersosialisasi dan mengatur pemerintahan. Dalam konteks ini, inovasi teknologi memainkan peran penting dalam pembentukan dan penyesuaian kebijakan publik, menciptakan regulasi, serta mendorong pemerintahan adaptif yang menggunakan sumber terbuka untuk meningkatkan efisiensi operasional. Menurut Alsharif (2024), teknologi memiliki peran vital dalam mengatasi tantangan sosial dan meningkatkan layanan publik serta transparansi pemerintah. Kolaborasi yang efektif antara pembuat kebijakan, ahli teknologi, dan masyarakat diperlukan untuk mengembangkan kebijakan yang mempromosikan inovasi, kesetaraan dan keberlanjutan untuk memastikan bahwa teknologi berfungsi sebagai kekuatan untuk kebaikan di masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU 11/2008) dan perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (TITE) diharapkan dapat mengoptimalkan efektivitas beserta efisiensi dari pelayanan publik, ini memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengembangkan ide dan keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi secara maksimal dan bertanggung jawab, serta menjamin keselamatan, keadilan, dan kepastian hukum di semua pihak yang terlibat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU 14/2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menyatakan bahwa dengan mengoptimalkan layanan publik kepada masyarakat melalui kebijakan, tata aturan, atau undang-undang

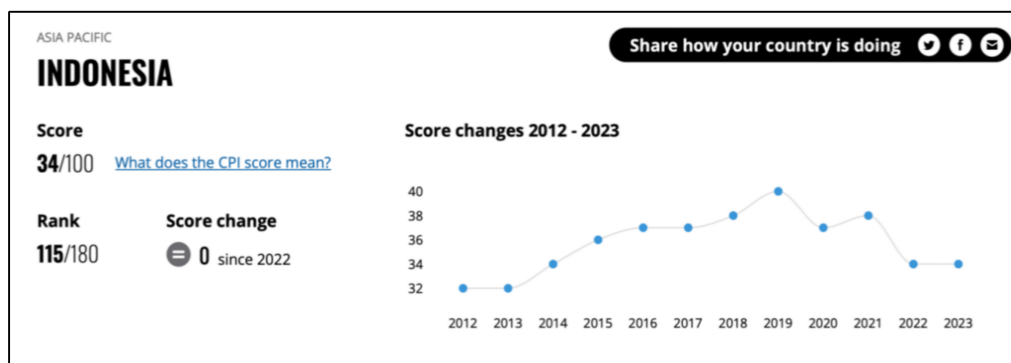
yang efektif, efisien, dan transparan masyarakat berhak mendapatkan jaminan akses terhadap informasi publik serta kebebasan memperoleh informasi, tujuannya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Transparansi dan akuntabilitas ini merupakan elemen penting dari *good governance*, di mana prinsip-prinsip seperti partisipasi, responsivitas, dan integritas dalam pemerintahan diutamakan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu fungsi esensial dalam pemerintahan yang secara signifikan mempengaruhi efisiensi, efektivitas, dan transparansi pelayanan publik. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam PBJ menjadi keharusan dan tidak bisa diabaikan. Masyarakat, sebagai pengguna akhir dari barang dan jasa tersebut, berhak menikmati pelayanan terbaik dari pemerintah dan lembaga negara. Sebaliknya, pemerintah dan lembaga publik berkewajiban secara moral dan hukum untuk menggunakan anggaran publik dengan efisien dan efektif (Rakhman, 2023). Selain itu, PBJ memainkan peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi, dan memastikan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal. OECD (2023) mencatat bahwa pengadaan publik membantu dalam pengelolaan sumber daya publik secara efisien dan efektif. Namun, mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam PBJ tidaklah mudah karena melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam serta adanya berbagai tantangan, seperti korupsi, diskriminasi, penyalahgunaan wewenang dan lainnya.

Transparency International (2024) merilis peringkat *Corruption Perception Index (CPI)* Tahun 2023 dengan hasil peringkat Indonesia untuk persepsi korupsi pada sektor publik berada di skor 34/100, sama dengan CPI Indonesia Tahun 2022, dengan peringkat 115 dari 180 negara. Stagnasi skor CPI pada tahun 2023 menunjukkan bahwa respons terhadap praktik korupsi masih mengalami kemajuan yang lambat, bahkan cenderung memburuk setelah tahun 2019, hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan yang konkret dari para pemangku kepentingan.



Gambar 1.1 *Corruption Perceptions Index Indonesia (2023)*
 Sumber : *Website Transparency International* (diakses 3 April 2024)



Gambar 1.2 *Corruption Perceptions Index Indonesia 2012-2023*
 Sumber : *Website Transparency International* (diakses 3 April 2024)

Data statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa dari tahun 2004-2023, kasus gratifikasi/penyuapan dan PBJ menduduki kasus teratas dalam tindak pidana korupsi, dengan jumlah masing-masing 989 dan 339 perkara. Gratifikasi dan penyuapan juga berasal dari praktik PBJ (KPK, 2024a). Korupsi dalam PBJ merupakan masalah serius, data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* (2022) juga menunjukkan bahwa PBJ merupakan salah satu kasus korupsi terbanyak yang ditangani oleh lembaga penegak hukum yang mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai triliunan rupiah. Meskipun anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan sangat besar, transparansi data masih minim, sehingga sulit bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Dampaknya tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pemenuhan pelayanan publik dan bahkan dapat membahayakan jiwa individu.



Gambar 1.3 TPK Berdasarkan Jenis Perkara 2004-2023
Sumber : Data Statistik KPK, 2024

Menghadapi masalah serius ini, teknologi informasi menawarkan solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Teknologi informasi memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas vertikal dan horizontal, serta partisipasi masyarakat. Teknologi informasi dapat membantu dalam pemberantasan korupsi dengan cara mengurangi asimetri informasi, memfasilitasi tindakan kolektif, mengotomatisasi dan menstandarisasi proses pemerintahan, membatasi diskresi pejabat publik, serta mengurangi birokrasi. Selain itu, teknologi informasi juga meningkatkan kemungkinan pemberian hukuman yang lebih efektif (Adam & Fazekas, 2021). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan aktivitas lembaga adalah salah satu cara efektif mengurangi risiko korupsi. Transparansi ini dapat ditingkatkan dengan penggunaan teknologi informasi, seperti *platform online* atau layanan publik elektronik bagi pihak-pihak yang terkait (Susilo dkk., 2023).

Untuk itu dalam rangka mewujudkan *good governance*, pemerintah melakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam lingkup PBJ melalui sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*). Berbagai negara juga telah mengimplementasikan *e-procurement* yang merupakan bagian dari usaha reformasi administrasi publik. Penerapan *e-procurement* tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan integritas proses pengadaan, tetapi juga untuk meminimalkan risiko korupsi (Arista & Fazekas, 2024), memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam pengadaan publik. Hal ini juga didukung oleh Jiménez dkk. (2022) bahwa penerapan *e-procurement* dan peningkatan kualitas lembaga pemerintahan

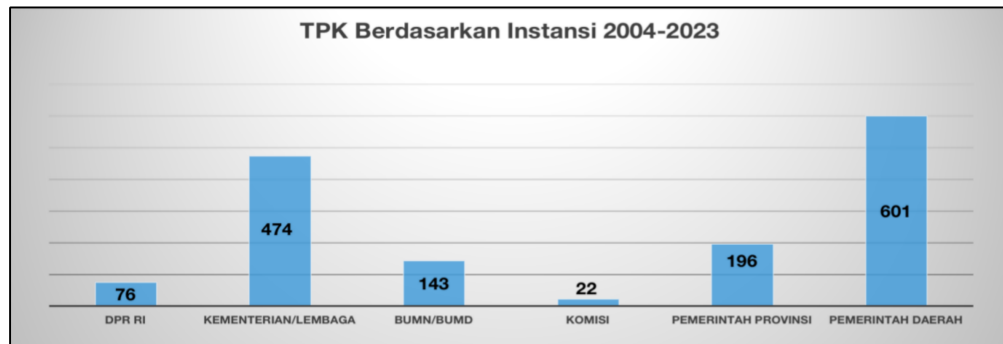
memiliki peran penting dalam upaya mengurangi praktik korupsi. Menurut Mackey & Cuomo (2020), keuntungan utama dari *e-procurement* adalah kemampuannya untuk mendigitalkan informasi sehingga bisa dibaca, ditulis, disimpan, dan dicari. Setiap tahap dalam proses pengadaan dapat dipantau dengan lebih mudah dan efisien, serta memungkinkan partisipasi lebih luas dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penggunaan *e-procurement* menjadi semakin penting dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan publik.

Sejak tahun 2006, Indonesia juga telah mengadopsi sistem *e-procurement* sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) telah mengatur bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) wajib dilakukan secara elektronik. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meluncurkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang bertujuan untuk menciptakan proses pengadaan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dimana persyaratan teknis operasional ada pada Peraturan Lembaga LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) (Peraturan LKPP, 2021). SPSE adalah platform *e-procurement* yang mencakup Tender/Seleksi/Tender Cepat, Non Tender (Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung), Pencatatan Non Tender, Pencatatan Swakelola, Pencatatan Pengadaan Darurat, e-Audit, dan Manajemen Kontrak, yang dirancang agar dimanfaatkan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). Digitalisasi sistem pengadaan ini merupakan langkah penting yang diterapkan oleh LKPP demi menciptakan transparansi dan keterbukaan dalam proses PBJ. Dengan sistem pengadaan yang digital, harga barang maupun jasa dapat dipantau secara *real-time*, yang membantu dalam merumuskan metodologi yang tepat sesuai dengan kondisi pasar. Digitalisasi ini juga merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) dalam belanja pemerintah, dengan

tujuan mewujudkan ekonomi yang inklusif sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 (Inpres 2/2022). Namun, transformasi digital dalam pengadaan bukan hanya sekadar penggantian cara kerja manual menjadi elektronik, tetapi juga melibatkan perbaikan kebijakan dan sistem Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dan data yang dimana SDM pelaksanaannya harus punya kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 7/2021. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengadaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan (LKPP, 2024).

Kebijakan *e-procurement* ini melibatkan kombinasi berbagai instrumen kebijakan seperti regulasi, dukungan teknologi dan program khusus (seperti pelatihan dan pembinaan SDM), yang berinteraksi untuk mencapai tujuan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam PBJP yang berkembang seiring waktu; memiliki tujuan akhir yang jelas; serta mencakup berbagai instrumen yang saling berhubungan. Menurut OECD dalam Rodríguez-Barillas dkk. (2024), dibutuhkan kombinasi berbagai kebijakan untuk mendorong perubahan perilaku, yang dalam konteks ini merujuk pada perubahan cara kerja dan pola pikir para pelaksana pengadaan dalam menggunakan metode elektronik. Penelitian terdahulu juga mendukung hal ini, bahwa kebijakan merupakan faktor pendorong dalam penggunaan teknologi, seperti yang ditemukan dalam penelitian Ajao dkk. (2018); Deng dkk. (2024); Ofori & Fuseini (2020); Yevu & Yu (2019); dan Zulkarnain dkk. (2023). Kombinasi kebijakan tersebut dapat dinilai dari karakteristik kebijakan campuran yaitu konsistensi, koherensi, kredibilitas dan komprehensivitas kebijakan (Rogge & Schleich, 2018). Namun, penelitian pada umumnya masih kurang memperhatikan persepsi pengguna terhadap kebijakan dan cenderung mengandalkan kerangka stimulus-respons. Oleh karena itu, dalam konteks penggunaan teknologi, penting untuk meneliti bagaimana persepsi pengguna terhadap kebijakan dalam mempengaruhi adopsi teknologi, untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada benar-benar mendukung penggunaan teknologi.

Sementara itu, disisi lain dalam hal pemerintah daerah, data KPK (2024) menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilaporkan berdasarkan instansi dari tahun 2004 hingga 2023, secara konsisten terbanyak terjadi di lingkungan pemerintah daerah yaitu sebanyak 601 perkara. Hal ini menandakan adanya permasalahan yang signifikan dalam tata kelola dan pengelolaan sumber daya di tingkat daerah.



Gambar 1.4 TPK Berdasarkan Instansi 2004-2023

Sumber : Data Statistik KPK, 2024

Masalah korupsi di lingkungan pemerintah daerah tersebut, tidak hanya mencerminkan masalah tata kelola, tetapi juga menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan korupsi yang dilakukan melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) oleh KPK. Oleh karena itu, KPK melakukan pemantauan di Pemerintah Daerah melalui MCP tersebut, agar Pemerintah Daerah melaksanakan tindakan pencegahan terhadap korupsi, baik sebelum terjadinya tindakan korupsi maupun setelah upaya penegakan hukum oleh lembaga seperti KPK atau APH lainnya. Dalam MCP KPK 2023, PBJ menjadi salah satu sorotan utama terkait kerentanan terhadap korupsi, di mana pelaksanaan *e-procurement* menjadi sub indikator penting dalam penilaian, mencakup penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP), Pengadaan Langsung melalui sistem, hingga implementasi *e-purchasing*. Pada MCP KPK (2024), transparansi pengadaan dan pelaksanaan *e-purchasing* juga masih menjadi salah satu sorotan utama dan menjadi sub indikator penilaian. Di Kabupaten Ogan Ilir, Nilai MCP KPK Tahun 2023 telah mencapai nilai 79, berada pada kisaran 75,01-100 (zona hijau). Ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam pencegahan korupsi di Kabupaten Ogan Ilir sangat baik.

Tabel 1.1 Nilai MCP KPK Ogan Ilir

Standar Nilai	Zona	Makna Warna	Nilai MCP KPK Ogan Ilir			Nilai MCP KPK PBJ Ogan Ilir		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
0-25	Merah	Sangat Buruk						
25,01-50	Kuning	Buruk	46					
50,01-75	Biru	Baik		75		55		
75,01-100	Hijau	Sangat Baik			79		87	77

Sumber: KPK, 2023

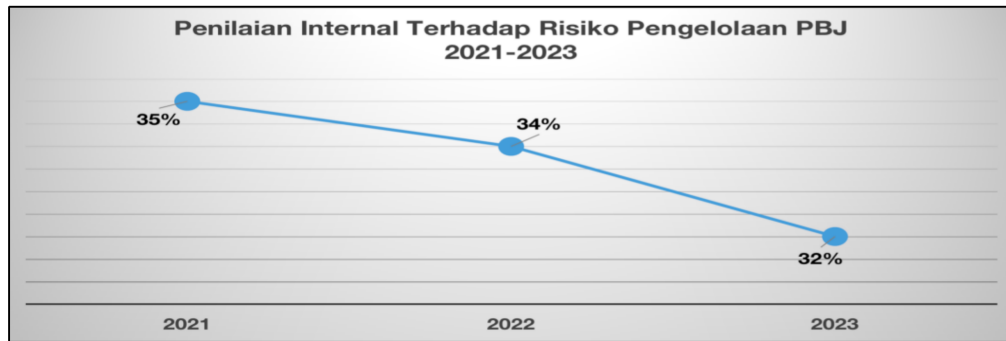
Namun, meskipun terdapat upaya yang signifikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui MCP, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan bahwa kerentanan terhadap korupsi di Kabupaten Ogan Ilir masih tinggi, terutama dalam pengelolaan PBJ. Hasil SPI dari tahun 2021-2023 di Kabupaten Ogan Ilir berturut-turut masih masuk kategori rentan pada kisaran 0-72,9 yaitu sebesar 69,60; 65,24 dan 72,14. Hal ini berarti bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam pengawasan dan implementasi kebijakan antikorupsi, kerentanan terhadap praktik korupsi di Kabupaten Ogan Ilir masih tinggi dan memerlukan perhatian lebih lanjut.

Tabel 1.2 Perbandingan Nilai SPI Ogan Ilir dan Standar Nilai SPI KPK

Standar Nilai SPI	Standar Kategori SPI	Nilai SPI Ogan Ilir			Kategori SPI Ogan Ilir		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
0-72,9	Rentan	69,60	65,24	72,14	Rentan	Rentan	Rentan
73 - 77,9	Waspada						
78-100	ter-Jaga						

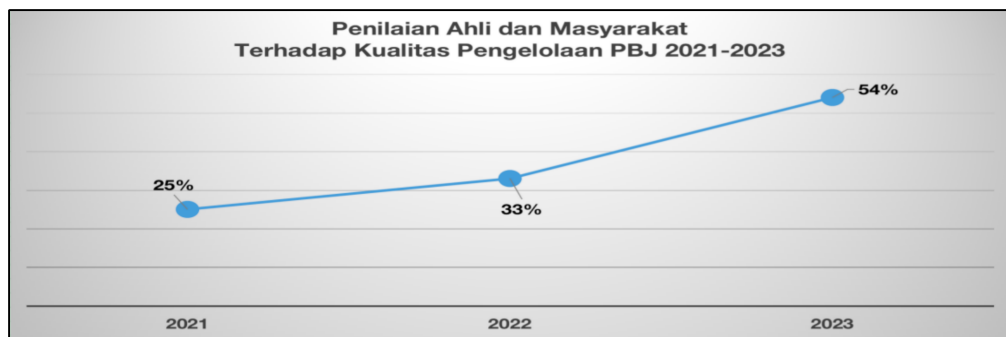
Sumber: KPK, 2023

Lebih jauh lagi, meskipun penilaian internal menunjukkan penurunan kecil dalam risiko korupsi, penilaian eksternal dari berbagai pemangku kepentingan justru menunjukkan persepsi yang semakin buruk terhadap kualitas pengelolaan PBJ di Kabupaten Ogan Ilir. Pada komponen internal, yang mengukur tingkat kerawanan korupsi berdasarkan penilaian pegawai di Kabupaten Ogan Ilir terhadap Risiko Pengelolaan PBJ, dari Tahun 2021-2023 tidak banyak mengalami penurunan, dengan persentase sebesar 35%, 34%, dan 32%. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Kabupaten Ogan Ilir masih mengidentifikasi adanya permasalahan dan penyimpangan dalam proses PBJ.



Gambar 1.5 Penilaian Internal Risiko Pengelolaan PBJ Ogan Ilir
Sumber: KPK, 2023

Sementara itu, komponen eksternal yang mencakup penilaian dari narasumber ahli, pemangku kepentingan lainnya, serta masyarakat pengguna layanan, penerima manfaat, dan penyedia yang pernah mengikuti proses lelang menunjukkan bahwa penilaian terhadap Kualitas Pengelolaan PBJ di Kabupaten Ogan Ilir dari Tahun 2021-2023 mengalami peningkatan negatif yaitu secara berturut-turut 25%, 33% dan 54%. Ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap kualitas pengelolaan PBJ di Kabupaten Ogan Ilir semakin memburuk menurut para pemangku kepentingan.



Gambar 1.6 Penilaian Eksternal Kualitas Pengelolaan PBJ Ogan Ilir
Sumber: KPK, 2023

Selain penilaian SPI yang menunjukkan adanya berbagai tantangan, evaluasi melalui Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) juga mencerminkan berbagai aspek yang memerlukan perbaikan dalam sistem pengadaan di Kabupaten Ogan Ilir. ITKP yang diatur dalam Surat Edaran LKPP Nomor 4 Tahun 2021 (SE Kepala LKPP 4/ 2021) menjadi instrumen untuk mengevaluasi kemajuan dan kualitas manajemen pengadaan pada instansi pemerintah di Indonesia. Di Kabupaten Ogan Ilir, nilai ITKP dari Tahun

2021-2023 mengalami peningkatan dari predikat kurang ke predikat cukup dengan skor berturut-turut 42,87; 54,8 dan 63,08. Penilaian ini terdiri dari tiga indikator yaitu Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan, Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ serta Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ. Saat ini, indikator yang telah mencapai nilai optimal hanya Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ. Sedangkan kedua indikator lainnya masih belum optimal. Pemanfaatan Sistem Pengadaan melibatkan beberapa komponen utama, yaitu SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), *E-Tendering*, *E-Purchasing*, *Non-E-Tendering* & *Non-E-Purchasing*, serta *E-Kontrak*. Pemanfaatan sistem-sistem tersebut difokuskan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi proses pengadaan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan kepastian hukum dalam setiap tahapan pengadaan. Nilai ITKP pada Pemanfaatan Sistem Pengadaan Elektronik dari Tahun 2021-2023 juga mengalami peningkatan dengan skor berturut-turut dari 16,20; 18,20; dan 18,47 namun skor tersebut belum mencapai skor maksimal yaitu 30.

Tabel 1.3 Perbandingan Skor ITKP Maksimal dengan ITKP Ogan Ilir 2023 Pada Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Pemanfaatan Sistem Pengadaan	2021		2022		2023	
	Skor Max	Skor Didapat	Skor Max	Skor Didapat	Skor Max	Skor Didapat
SiRUP	10	0	10	7,2	10	8,09
E-Tendering	20	16,2	5	4,5	5	4,89
e-Purchasing			5	0	4	0
Non e-Tendering / Non e-Purchasing			5	3	5	0
e-Kontrak			5	3,5	5	4,49
Toko Daring					1	1
Total Skor	30	16,2	30	18,2	30	18,47

Sumber: LKPP, 2023

Dari tabel tersebut terlihat adanya peningkatan signifikan pada beberapa komponen seperti SiRUP dan *e-tendering*. SiRUP meningkat dari skor 0 menjadi 7,2 dan 8,09. *E-tendering* juga menunjukkan konsistensi yang baik dengan skor 16,2; 4,5 dan 4,89. Hal ini mencerminkan adanya usaha untuk peningkatan transparansi dan perencanaan pengadaan serta implementasi yang solid dalam *e-procurement*. Namun, terdapat aspek yang

menunjukkan performa kurang optimal, seperti *e-purchasing* yang konsisten mendapatkan skor nol sejak tahun 2022. Selain itu, terdapat penurunan skor pada Non e-Tendering/Non *e-purchasing* dari 3 menjadi 0 di tahun 2022-2023. Ini menunjukkan penurunan dalam variasi metode pengadaan yang digunakan dan menandakan adanya hambatan signifikan dalam implementasinya. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek *e-procurement*, tantangan signifikan masih ada dan perlu diatasi untuk mencapai penggunaan sistem pengadaan yang lebih efektif dan efisien di Kabupaten Ogan Ilir. Mengingat amanat presiden dalam Inpres 1/2015 dan Inpres 2/2022 untuk seluruh PBJ dilaksanakan secara elektronik, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut dalam penerapan *e-procurement*. Sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami aspek-aspek yang mempengaruhi penggunaan *e-procurement* di tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang masih ada dalam penerapan teknologi informasi sehingga dapat memperbaiki efektivitas dan efisiensi pengadaan barang maupun jasa.

Tantangan dalam implementasi *e-procurement* di Kabupaten Ogan Ilir tersebut, menyoroti pentingnya peran teknologi dalam memperbaiki kinerja pengadaan. Penggunaan teknologi juga merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kinerja (Mahmudi, 2019). Ini dibuktikan oleh penelitian dari Younes dkk. (2022) bahwa proses penggunaan komputer dan teknologi informasi berdampak positif pada kinerja organisasi. Begitu pula Poudel dkk. (2023) bahwa teknologi informasi yang efektif memiliki dampak signifikan pada kinerja organisasi. Pernyataan tersebut juga di dukung dari hasil penelitian dari Omar dkk. (2023) kemampuan akan teknologi informasi memiliki dampak positif pada kinerja organisasi. Dalam lingkup PBJ, hasil berbagai penelitian terdahulu menyatakan bahwa proses pengadaan melalui *e-procurement* akan mempengaruhi kinerja PBJ (Aini dkk. (2023); Aryati & Pangaribuan (2019); Assey (2024); Hadianto (2022); Kyola & Muthoni (2024); Masudin dkk. (2021); Masyhuri dkk. (2021); Pinaria dkk. (2020); dan Sánchez-Rodríguez dkk. (2020)). Namun penelitian terdahulu tersebut, hanya

menganalisis pengaruh variabel *e-procurement* terhadap kinerja PBJ dan belum secara mendalam mengeksplorasi faktor-faktor lainnya. Sebagian besar penelitian lebih banyak berfokus pada organisasi secara umum dan belum memberikan perhatian khusus pada UKPBJ di pemerintahan daerah. Sehingga diperlukan penelitian yang lebih komprehensif guna mengeksplorasi lebih lanjut hubungan antara penggunaan teknologi informasi dan kinerja organisasi, dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang mempengaruhi penggunaan teknologi terhadap kinerja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kinerja UKPBJ, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengadaan publik.

Penggunaan sistem informasi teknologi dalam membantu pencapaian target sebuah pekerjaan dapat dievaluasi dengan berbagai teori dan model tentang penerimaan dan penggunaan teknologi, salah satunya dengan menggunakan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)* dari Venkatesh et.al (2003) untuk menganalisis penerimaan dan penggunaan teknologi dalam konteks pengguna dengan melihat dari faktor ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi yang memfasilitasi. Konsep pemikiran pada model UTAUT ini telah diaplikasikan untuk mengeksplorasi praktik penggunaan teknologi dalam berbagai bidang di swasta maupun pemerintah. Misalnya penelitian Afsay dkk. (2023), Azman Ong dkk. (2023), Batucan dkk. (2022), Boison dkk. (2023), Enaizan dkk. (2020), Jufri & Budiman (2022), Nookhao & Kiattisin (2023), Rizun dkk. (2024), Shareef dkk. (2024), dan Suaryana dkk. (2023).

Penggunaan teori UTAUT juga digunakan dalam memahami penerimaan dan penggunaan *e-procurement*, seperti pada penelitian Soong dkk. (2020) di Malaysia, kemudian penelitian Jufri & Budiman (2022); Pramdana (2019); Suaryana dkk. (2023) dan Yudharini dkk. (2021) di Indonesia, penelitian Shatta & Shayo (2021) di negara-negara berkembang dengan fokus utama pada persepsi masyarakat di Tanzania dan penelitian dari Addy dkk. (2023) di Afrika Sub-Sahara. Dalam penelitian terdahulu tersebut terdapat inkonsistensi hasil riset terkait faktor-faktor pada teori UTAUT yaitu

ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial dan kondisi yang memfasilitasi. Misalnya hasil uji pada faktor ekspektasi kinerja, penelitian dari Addy dkk. (2023), Azman Ong dkk. (2023), Boison dkk. (2023), Enaizan dkk. (2020), Jufri & Budiman (2022), Pramdana (2019), Rizun dkk. (2024), Shatta & Shayo (2021), Soong dkk. (2020), Suaryana dkk. (2023) dan Yudharini dkk. (2021) menyatakan bahwa faktor ini mempengaruhi niat perilaku penggunaan teknologi. Namun pada penelitian lainnya, ekspektasi kinerja tidak mempengaruhi niat perilaku penggunaan teknologi (Batucan dkk. (2022) dan Shareef dkk. (2024)). Begitupun dengan faktor lainnya seperti ekspektasi usaha, pengaruh sosial dan kondisi yang memfasilitasi. Adanya inkonsistensi ini mengindikasikan perlunya penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki kondisi dan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan hasil ini. Terkait hal tersebut, pada penelitian ini salah satu tujuannya untuk mengisi gap penelitian dengan melakukan analisis yang lebih komprehensif dan sistematis terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi adopsi dan penggunaan teknologi, dalam hal ini adalah *e-procurement*, serta mempertimbangkan berbagai variabel lain yang memungkinkan mempengaruhi penerimaan sekaligus penggunaan sistem tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan dalam beberapa indikator seperti hasil MCP-KPK, kerentanan terhadap penyimpangan PBJ di Kabupaten Ogan Ilir masih tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya gap antara kebijakan yang diterapkan dan implementasi di lapangan. Hasil SPI juga menunjukkan penilaian negatif terhadap kualitas pengelolaan PBJ, baik dari perspektif internal maupun eksternal. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan yang ada belum cukup signifikan untuk mengubah persepsi dan realitas di lapangan. Masalah ini relevan dengan ilmu administrasi publik dan kebijakan publik karena mencerminkan kekurangan dalam penerapan kebijakan dan mekanisme pengawasan yang ada. Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan integritas dan efektivitas pemerintahan. Salah satu cara untuk mencapainya adalah mengoptimalkan penggunaan *e-procurement* yang belum tercapai secara penuh saat ini berdasarkan hasil dari ITKP. Ketidakefektifan dalam *e-procurement* akan menyebabkan praktik

penyimpangan, inefisiensi, dan potensi kerugian publik baik bagi masyarakat maupun pemerintah tetap berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut dari sudut pandang pengguna *e-procurement* dalam menggunakan sistem tersebut dengan berlandaskan teori UTAUT, yang mencakup faktor pendorong perilaku dari UTAUT serta menambahkan penilaian karakteristik kebijakan campuran untuk mengevaluasi penggunaan *e-procurement* terhadap kinerja UKPBJ sebagai unit kerja yang menjadi pusat keunggulan PBJ. Selain itu, Kabupaten Ogan Ilir merupakan contoh yang relevan dengan nilai SPI dan ITKP yang menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan *e-procurement*. Penelitian dengan berfokus di lokasi ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan peluang dalam konteks lokal yang spesifik serta dapat memberikan rekomendasi aplikatif untuk perbaikan tata kelola di daerah lain dengan karakteristik serupa. Dengan demikian, maka perlu untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh faktor pendorong perilaku dan penilaian karakteristik kebijakan terhadap minat menggunakan *e-procurement* dan penggunaan *e-procurement* terhadap kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di Kabupaten Ogan Ilir.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan *e-procurement* di Kabupaten Ogan Ilir?
2. Apakah ada pengaruh minat menggunakan *e-procurement* terhadap penggunaan *e-procurement* di Kabupaten Ogan Ilir?
3. Apakah ada pengaruh penggunaan *e-procurement* terhadap kinerja UKPBJ di Kabupaten Ogan Ilir?
4. Apa saja bentuk-bentuk usulan perbaikan terkait penggunaan sistem *e-procurement* untuk meningkatkan kinerja UKPBJ di Kabupaten Ogan Ilir?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disajikan, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk:

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan *e-procurement* di Kabupaten Ogan Ilir.
2. Menganalisis pengaruh minat menggunakan *e-procurement* terhadap penggunaan *e-procurement* di Kabupaten Ogan Ilir.
3. Menganalisis pengaruh penggunaan *e-procurement* terhadap kinerja UKPBJ Kabupaten Ogan Ilir.
4. Menyusun bentuk-bentuk usulan perbaikan yang diperlukan dalam penggunaan *e-procurement* untuk meningkatkan kinerja UKPBJ di Kabupaten Ogan Ilir.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bahan pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam mengevaluasi implementasi kebijakan sistem informasi dengan menghadirkan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan *e-procurement* di sektor publik serta menjadi acuan bagi studi adopsi teknologi di sektor publik dan pengembangan hipotesis baru.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman komprehensif kepada pemerintah daerah tentang faktor-faktor kunci penggunaan *e-procurement*, memungkinkan pengembangan strategi implementasi efektif, serta menjadi landasan merumuskan kebijakan yang mendukung penggunaan *e-procurement*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, I., & Fazekas, M. (2021). Are emerging technologies helping win the fight against corruption? A review of the state of evidence. *Information Economics and Policy*, 57, 100950. <https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2021.100950>
- Addy, M. N., Addo, E. T., Kwofie, T. E., & Yartey, J. E. (2023). Predicting the adoption of e-procurement in construction project delivery in Sub-Saharan Africa: An application of UTAUT2. *Construction Innovation*, 23(5), 1038–1053. <https://doi.org/10.1108/CI-09-2021-0174>
- Afsay, A., Tahriri, A., & Rezaee, Z. (2023). A meta-analysis of factors affecting acceptance of information technology in auditing. *International Journal of Accounting Information Systems*, 49, 100608. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2022.100608>
- Ahdika, A. (2017). Improvement of Quality, Interest, Critical, and Analytical Thinking Ability of Students through the Application of Research Based Learning (RBL) in Introduction to Stochastic Processes Subject. *International Electronic Journal of Mathematics Education*, 12(2), 167–191. <https://doi.org/10.29333/iejme/608>
- Aini, R., Sihombing, M., & Ridho, H. (2023). Pengaruh Penerapan Electronic Procurement Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. *PERSPEKTIF*, 12(2), 628–642. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i2.8926>
- Ajao, B. F., Oyebisi, T. O., & Aderemi, H. O. (2018). Factors influencing the implementation of e-commerce innovations: The case of the Nigerian informal sector. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*, 10(4), 473–481. <https://doi.org/10.1080/20421338.2018.1475541>
- Alsharif, A. (2024). *Technology And Public Policy. Dalam Understanding Technology. Utah Valley University (Press Book)*. <https://uen.pressbooks.pub/tech1010/>
- Arifin, J., Urumsah, D., Sari, I. P., & Ika, I. (2020). *Implementasi E-Procurement Dan Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa (First Edition)*. EKONISIA.
- Arista, I. T., & Fazekas, M. (2024). Public procurement corruption. Dalam L. De Sousa & S. Corrado (Ed.), *Elgar Encyclopedia of Corruption and Society* (1 ed., hlm. 281–285). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781803925806.ch62>
- Aryati, T., & Pangaribuan, L. (2019). Analisis Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pengadaan. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, 4(1), 19–24. <https://doi.org/10.25105/pdk.v4i1.4012>
- Asriani, Mintarti, S., & Zainurossalamia, S. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Dan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Pt. Mahakam Berlian Samjaya Samarinda. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 16 No. 3.

- Assey, E. P. (2024). Effect Of Tanzania National e-Procurement System Adoption On Performance Of Public Procurement In Tanzania A Case Of Selected Procuring Entities In Morogoro Region. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24621.87529>
- Azman Ong, M. H., Yusri, M. Y., & Ibrahim, N. S. (2023). Use and behavioural intention using digital payment systems among rural residents: Extending the UTAUT-2 model. *Technology in Society*, 74, 102305. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102305>
- Baihaki, & Rachman, A. (2021). Modul Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pusklat LKPP. https://bpbj.posokab.go.id/public/deploy/pdf/1680571748_71707eb25b6b0a8b408b.pdf
- Batucan, G. B., Gonzales, G. G., Balbuena, M. G., Pasaol, K. R. B., Seno, D. N., & Gonzales, R. R. (2022). An Extended UTAUT Model to Explain Factors Affecting Online Learning System Amidst COVID-19 Pandemic: The Case of a Developing Economy. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 5, 768831. <https://doi.org/10.3389/frai.2022.768831>
- Berman, E. M., & Hijal-Moghrabi, I. (2023). *Performance and Innovation in the Public Sector: Managing for Results* (Third edition). Routledge (Taylor & Francis Group). DOI: 10.4324/9781003304753
- Beza, E., Reidsma, P., Poortvliet, P. M., Belay, M. M., Bijen, B. S., & Kooistra, L. (2018). Exploring farmers' intentions to adopt mobile Short Message Service (SMS) for citizen science in agriculture. *Computers and Electronics in Agriculture*, 151, 295–310. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2018.06.015>
- Boison, D. K., Antwi-Boampong, A., Augustine, B., Doumbia, M. O., Esther, A., & Sarbeng, K. O. (2023). Factors Influencing Employees' Intention To Participate In A Bring Your Own Device In The Port Supply Chain Network: A Correlational Study Using UTAUT2 Theoretical. Vol. 101 No. 11. <http://www.jatit.org/volumes/Vol101No11/11Vol101No11.pdf>
- BPS Ogan Ilir. (2024). Kabupaten Ogan Ilir Dalam Angka (Ogan Ilir Regency in Figures) 2024 (Vol. 15). BPS Kabupaten Ogan Ilir. <https://oganilirkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/426e6235d4ebc44cd2363377/kabupaten-ogan-ilir-dalam-angka-2024.html>
- Bruno, J. M., Bianchi, E. C., & Sánchez, C. (2022). Determinants of household recycling intention: The acceptance of public policy moderated by habits, social influence, and perceived time risk. *Environmental Science & Policy*, 136, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.05.010>
- Cairney, P. (2020). *Understanding Public Policy Theories and Issues: 2nd edition* (2nd edition). Red Global Press (Springer Nature Limited). <https://www.bloomsbury.com/us/understanding-public-policy-9781137545183/>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Sixth Edition* (Sixth). SAGE Publications, Inc. <https://lcn.loc.gov/2022032270>

- Delone, W., & McLean, E. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Deng, N., Gong, Y., & Wang, J. (2024). Promoting blockchain technology in low-carbon management to achieve firm performance from a socio-economic perspective: Empirical evidence from China. *Journal of Cleaner Production*, 448, 141686. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.141686>
- Djani, W. (2022). *Administrasi Publik (Teori dan Pergeseran Paradigma ke Era Digital)*. Zifatama Jawa. https://books.google.co.id/books?id=2tJuEAAAQBAJ&pg=PA1&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false
- Dooren, W. van, Bouckaert, G., & Halligan, J. (2015). *Performance management in the public sector (Second edition)*. Routledge.
- Dubey, U. K. B., & Kothari, D. P. (2022). *Research Methodology: Techniques and Trends (1 ed.)*. Chapman and Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781315167138>
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis An Integrated Approach Sixth Edition (Sixth edition published 2018)*. Routledge (Taylor & Francis Group). <https://www.routledge.com/Public-Policy-Analysis-An-Integrated-Approach/Dunn/p/book/9781138743847>
- Efendi, S. (2023). *Populasi dan Sampel. Dalam Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Ed.1)*. Media Sains Indonesia.
- Elvera, E., & Astarina, Y. (2021). *Metodologi Penelitian (Ed. 1)*. Penerbit ANDI.
- Enaizan, O., Eneizan, B., Almaaitah, M., Al-Radaideh, A. T., & Saleh, A. M. (2020). Effects of privacy and security on the acceptance and usage of EMR: The mediating role of trust on the basis of multiple perspectives. *Informatics in Medicine Unlocked*, 21, 100450. <https://doi.org/10.1016/j.imu.2020.100450>
- Fischer, F., Miller, G. J., & Mara S., S. (2019). *Handbook of Public Policy Analysis*. Routledge. <http://www.taylorandfrancis.com>
- Flanagan, K., Uyerra, E., & Laranja, M. (2011). Reconceptualising the “policy mix” for innovation. *Research Policy*, 40(5), 702–713.
- Ghozali, I. (2021). *Partial Least Squares: Konsep Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris (Ed. 3)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gilchrist, A. (2016). *Industry 4.0: The Industrial Internet of Things*. Apress. <https://doi.org/10.1007/978-1-4842-2047-4>
- Grüne-Yanoff, T., & Hertwig, R. (2016). Nudge Versus Boost: How Coherent are Policy and Theory? *Minds and Machines*, 26(1–2), 149–183. <https://doi.org/10.1007/s11023-015-9367-9>
- Hadianto, A. W. (2022). Dampak Penggunaan E-procurement, Akuntabilitas, Kompetensi dan Kompensasi pada Kinerja Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. <https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/view/1104/1103>

- Hair, J. F., Jr., Hult, G. T. M., Ringle, R. M. ngle, & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (Third Edition)*. SAGE Publications, Inc. <https://lccn.loc.gov/2021004786>
- Hamkah, H., Sahar, N., Sarie, F., Arysata, A. A. N., Gustang, A., Rustam, M. S. P. A., Badrun, B., Rachman, R., Sari, D., Pratyahara, G. S., & Tukimun, T. (2023). *Pengantar Manajemen Rantai Pasok & Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah*. CV. Tohar Media. <https://toharmedia.co.id>
- Hartati, A., Fanggidae, H. C., Aisyah, S., Binawati, E., Fanggidae, F. O., Ala, H. M., Rosari, R., Lake, F. I., Sitinjak, C., & Lerrick, Y. F. (2022). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Media Sains Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/361982611_Pengukuran_Kinerja_Sektor_Publik_Teori_dan_Aplikasi
- Hazari, A. (2023). *Research Methodology for Allied Health Professionals: A comprehensive guide to Thesis & Dissertation*. Springer Nature Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-99-8925-6>
- Hidayat, M. N. R., Latifah, L., & Tusyanah, T. (2023). Analyzing the factors affecting the use behavior of the SIRADI system through behavioral intention as the mediating variable using the UTAUT 2 model. *Sustainable Social Development*, 1(2). <https://doi.org/10.54517/ssd.v1i2.2223>
- Hwang, J., Lee, J.-S., & Kim, H. (2019). Perceived innovativeness of drone food delivery services and its impacts on attitude and behavioral intentions: The moderating role of gender and age. *International Journal of Hospitality Management*, 81, 94–103. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.03.002>
- ICW. (2022, Januari 22). *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Lahan Basah Korupsi [Website organisasi non-pemerintah (NGO)]*. Indonesia Corruption Watch. <https://icw.or.id/Zxkq>
- Indonesia, L. (2023, Oktober 18). *Infografik & FAQ Proses Generate RKA PEMDA T.A. 2024. LKPP*. <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/unduhctr/unduh>
- Indonesia, L. (2024a). *Data Sebaran JF PPBJ Pemerintah Daerah Tahun 2024. PPSDM LKPP*. <https://ppsdm.lkpp.go.id/jumlah-dan-persebaran-jabfung-ppbj/pemda>
- Indonesia, L. (2024b). *Hasil Sementara ITKP 2024. LKPP*. siukpbj.lkpp.go.id
- Indonesia, L. (2024c, Oktober 5). *Pemberitahuan tentang Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Sementara Tahun 2024 [Surat Pemberitahuan]*. <https://pmep.lkpp.go.id/itkp>
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2015). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/77355/inpres-no-1-tahun-2015>
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pub. L. No. 2 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/204320/inpres-no-2-tahun-2022>

- Jiménez, A., Hanoteau, J., & Barkemeyer, R. (2022). E-procurement and firm corruption to secure public contracts: The moderating role of governance institutions and supranational support. *Journal of Business Research*, 149, 640–650. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.05.070>
- Josiah, T., Riswandi, I., & Tukimun, T. (2024). *Manajemen Pengadaan (Pertama)*. CV. Tripe Konsultan Juranl Corner And Publishing. https://www.researchgate.net/publication/377656344_Manajemen_pengadaan
- Jufri, Z. & Budiman. (2022). Analysis Of Acceptance and Use of E-Procurement Applications Using Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) In the Procurement of Goods and Services at PT. JMS. *International Journal of Scientific Research in Science and Technology*, 308–315. <https://doi.org/10.32628/IJSRST229169>
- Keputusan Deputi IV Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Clearing House, Pub. L. No. 10, 8 (2021). <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/keputusan-deputi-iv/keputusan-deputi-iv-nomor-10-tahun-2021>
- Kern, F., & Howlett, M. (2009). Implementing transition management as policy reforms: A case study of the Dutch energy sector. *Policy Sciences*, 42(4), 391–408. <https://doi.org/10.1007/s11077-009-9099-x>
- KPK. (2023a). *Capaian MCP Pemerintah Kab. Ogan Ilir 2023 [Website e-governance]*. Jaga KPK. <https://jaga.id/jendela-pencegahan/korwil?vnk=1bd7b5c3>
- KPK. (2023b). *Integrity 2023: Survei Penilaian Integritas*. KPK. <https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=7dbe2095>
- KPK. (2023c). *Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2023*. KPK.
- KPK. (2024a). *Data Statistik Tindak Pidana Korupsi*. KPK. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>
- KPK. (2024b). *Pedoman Monitoring For Prevention (MCP) Tahun 2024*. KPK.
- Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif (Edisi Revisi)*. Penerbit Yayasan Kita Menulis.
- Kyola, M., & Muthoni, D. (2024). Electronic Procurement and Performance of Procurement Function of County Governments in Kenya. *International Journal of Social Science and Humanities Research (IJSSHR)* ISSN 2959-7056 (o); 2959-7048 (p), 2(2), 129–146. <https://doi.org/10.61108/ijsshr.v2i2.102>
- Leavy, P. (2023). *Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches (SECOND EDITION)*. THE GUILFORD PRESS. <https://www.guilford.com/books/Research-Design/Patricia-Leavy/9781462548972>
- LKPP. (2023). *Penilaian Final Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) Tahun 2023*. LKPP. [https://siukpbj.lkpp.go.id/detail/penilaianfinalindekstatakelopengadaan\(itkp\)kementerian,lembaga,danpemerintahdaerah\(klpemda\)tahun2023](https://siukpbj.lkpp.go.id/detail/penilaianfinalindekstatakelopengadaan(itkp)kementerian,lembaga,danpemerintahdaerah(klpemda)tahun2023)

- LKPP. (2024). Digitalisasi Sistem Pengadaan: Transformasi Pengadaan untuk Indonesia Maju [Government Website]. LKPP. <https://www.lkpp.go.id/read/bu/digitalisasi-sistem-pengadaan-transformasi-pengadaan-untuk-indonesia-maju>
- Mackey, T. K., & Cuomo, R. E. (2020). An interdisciplinary review of digital technologies to facilitate anti-corruption, transparency and accountability in medicines procurement. *Global Health Action*, 13(sup1), 1695241. <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1695241>
- Maestre-Andrés, S., Drews, S., & Van Den Bergh, J. (2019). Perceived fairness and public acceptability of carbon pricing: A review of the literature. *Climate Policy*, 19(9), 1186–1204. <https://doi.org/10.1080/14693062.2019.1639490>
- Mahmudi, M. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi Ketiga, Cetakan Kedua)*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFPE - Yogyakarta.
- Manik, E. I. H. M. (2023, Januari). *Masa Depan Mesin: Peran Utama Teknologi Cerdas dalam Perkembangan Mesin*.
- Mardiasmo, M. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Terbaru)*. Penerbit ANDI.
- Marikyan, D., & Papagiannidis, S. (2022). *Theoryhub Book: A Theory Resource For Student And Researchers Alike*. Theoryhub Book. Online Edition: <https://open.ncl.ac.uk>
- Marwiyah, S. (2022). *Buku Ajar: Kebijakan Publik (Administrasi Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis, dan Evaluasi Kebijakan)*. CV Mitra Ilmu.
- Masudin, I., Aprilia, G. D., Nugraha, A., & Restuputri, D. P. (2021). Impact of E-Procurement Adoption on Company Performance: Evidence from Indonesian Manufacturing Industry. *Logistics*, 5(1), 16. <https://doi.org/10.3390/logistics5010016>
- Masyhuri, G., Ismail, I., & Aminah, S. (2021). Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Good Governance terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, Vol 2 No 1. <https://www.ojs.univprima.ac.id/index.php/jangpa/article/view/167/140>
- Nookhao, S., & Kiattisin, S. (2023). Achieving a successful e-government: Determinants of behavioral intention from Thai citizens' perspective. *Heliyon*, 9(8), e18944. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18944>
- Nurhadi, N. (2015). *Anteseden Penggunaan E-Commerce: Pengaruhnya Terhadap Manajemen Pengetahuan Dan Kinerja Organisasi (Studi Pada Hotel Berbintang Di Provinsi Bali)* [Disertasi, Universitas Brawijaya]. https://www.researchgate.net/publication/324136613_Anteseden_Penggunaan_E-Commerce_Pengaruhnya_Terdapat_Manajemen_Pengetahuan_Dan_Kinerja_Organisasi_Studi_Pada_Hotel_Berbintang_Di_Provinsi_Bali_Disertasi
- OECD. (2007). *Integrity in Public Procurement: Good Practice from A to Z*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264027510-en>

- OECD. (2023). Public Procurement [Website organisasi penelitian kebijakan]. OECD. <https://www.oecd.org/en/topics/public-procurement.html>
- Ofori, D., & Fuseini, O. I. (2020). Electronic Government Procurement Adoption in Ghana: Critical Success Factors. *Advances in Research*, 18–34. <https://doi.org/10.9734/air/2020/v21i330191>
- Ogan Ilir, B. (2022, September 27). Surat Himbauan Bupati Ogan Ilir Nomor 027/346/X/2022 Tentang Himbauan Pendaftaran Katalog Elektronik Lokal [Surat Himbauan]. BPBJ Setda Ogan Ilir.
- Ogan Ilir, B. (2023a, Maret 14). Surat Edaran Nomor 027/096/X/2023 tentang Penggunaan E-purchasing Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir [Komunikasi pribadi].
- Ogan Ilir, B. (2023b, Maret 14). Surat Edaran Nomor 027/097/X/2023 tentang Pelaksanaan Pengadaan Langsung dalam SPSE pemerintah Kabupaten Ogan Ilir [Surat Edaran].
- Ogan Ilir, B. (2024a, Januari 29). Surat Perjanjian Kontrak Jasa Sewa Colocation Server Kabupaten Ogan Ilir Nomor 027/001/SPK/UKPBJ/2024 Tanggal 29 Januari 2024.
- Ogan Ilir, B. (2024b, September 10). Laporan Rekapitulasi Realisasi Belanja UKPBJ Kabupaten Ogan Ilir Per 10 September 2024.
- Ogan Ilir, B. (2024c, September 24). Daftar Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024. BPBJ Setda Ogan Ilir.
- Ogan Ilir, I. (2022, Juni 25). Sejarah Ogan Ilir [Pemerintah]. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. <https://inspektorat.oganilirkab.go.id/page/sejarah-ogan-ilir>
- Ogan Ilir, S. (t.t.). Surat Edaran Nomor 027/153/X/2022 Tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir [Surat Edaran].
- Omar, A. O., Jailani, S. F. A. K., Ali, S. A. M., & Yunus, N. M. (2023). Impact of Information Technology Towards Organizational Performance. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 10(6.2), 128–137. <https://doi.org/10.14738/assrj.106.2.15019>
- Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Pub. L. No. 37 (2018).
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, Pub. L. No. 7 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/169557/peraturan-lkpp-no-7-tahun-2021>
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pub. L. No. 10, 26 hlm (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/169561/peraturan-lkpp-no-10-tahun-2021>

- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan, Pub. L. No. 16 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/158212/peraturan-lkpp-no-16-tahun-2018>
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Pub. L. No. 12 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/169565/peraturan-lkpp-no-12-tahun-2021>
- Peraturan Lembaga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, 14 (2018). <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-14-tahun-2018>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Pub. L. No. 112. Diambil 20 Maret 2024, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/245193/permendagri-no-112-tahun-2018>
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Pub. L. No. 14 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/159651/permen-pupr-no-14-tahun-2020>
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Pub. L. No. 28, 12 hlm (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/143786/permen-pan-rb-no-28-tahun-2019>
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pub. L. No. 12 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161828/perpres-no-12-tahun-2021>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pub. L. No. 16 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018>
- Phuong, B. H. (2016). Using Theory Of Reasoned Action (TRA) In Researching Information Behavior of Lecturer. *International Journal of Library and Information Studies*, Vol. 6(3), 64–68.
- Pinaria, A. G., Supriyadi, E., & Derriawan. (2020). Pengaruh Procurement Planning dan Kompetensi Sdm Terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pt Angkasa Pura I (Persero) Melalui E-Procurement System Dengan Information Technology sebagai Variabel Moderator. 5 No 1.
- Poudel, S., Rajkarnikar, N., Shrestha, D., Shrestha, D., & Jeong, S. R. (2023). Business and Information Technology Strategy Impact on Organizational Performance: A Case Study of Nepal Telecom. Dalam P. Vasant, M. Shamsul Arefin, V. Panchenko, J. J. Thomas, E. Munapo, G.-W. Weber, & R. Rodriguez-Aguilar (Ed.), *Intelligent Computing and Optimization* (Vol. 855, hlm. 33–44). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-50158-6_4

- Pramdana, H. S. (2019). Behavior Analysis Of Goods / Services Providers In Using Electronic Procurement System (E-Procurement). *Journal of Government and Politics*, 10(1). <https://doi.org/10.18196/jgp.10198>
- Prismacs. (2024, Februari 26). Masa Depan Pengadaan Bersifat Prediktif: Bagaimana Teknologi Mengubah Proses Pengadaan [Website Layanan Industri dan Solusi Teknik]. Prismecs. https://prismecs-com.translate.google.com/blog/the-future-of-procurement-is-predictive-how-technology-is-transforming-the-procurement-process?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Purnia, D. S., & Alawiyah, T. (2020). *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Graha Ilmu.
- Putra, S., Tuerah, P. R., Mesra, R., Sarman, F., Nur, N. A., Nuruzzaman, M., Susmita, N., Sari, M. N., Ladjin, N., Sinaga, E. K., & Saddam, J. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kuantitatif)*. PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Rakhman, A. A. (2023). *Kumpulan Teori Pengadaan Barang dan Jasa Publik (Panduan Analisis) (Ed.1, Vol. 1)*. Yayasan Kita Menulis.
- Rizun, N., Alexopoulos, C., Saxena, S., Kleiman, F., & Matheus, R. (2024). Do personality traits influence the user's behavioral intention to adopt and use Open Government Data (OGD)? An empirical investigation. *Telematics and Informatics*, 87, 102073. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2023.102073>
- Rodríguez-Barillas, M., Klerkx, L., & Poortvliet, P. M. (2024). What determines the acceptance of Climate Smart Technologies? The influence of farmers' behavioral drivers in connection with the policy environment. *Agricultural Systems*, 213, 103803. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2023.103803>
- Rogge, K. S., & Dütschke, E. (2018). What makes them believe in the low-carbon energy transition? Exploring corporate perceptions of the credibility of climate policy mixes. *Environmental Science & Policy*, 87, 74–84. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.05.009>
- Rogge, K. S., & Reichardt, K. (2016). Policy mixes for sustainability transitions: An extended concept and framework for analysis. *Research Policy*, 45(8), 1620–1635. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.004>
- Rogge, K. S., & Schleich, J. (2018). Do policy mix characteristics matter for low-carbon innovation? A survey-based exploration of renewable power generation technologies in Germany. *Research Policy*, 47(9), 1639–1654. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.05.011>
- Rose, D. C., Sutherland, W. J., Parker, C., Lobley, M., Winter, M., Morris, C., Twining, S., Ffoulkes, C., Amano, T., & Dicks, L. V. (2016). Decision support tools for agriculture: Towards effective design and delivery. *Agricultural Systems*, 149, 165–174. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2016.09.009>
- Sánchez-Rodríguez, C., Martínez-Lorente, A. R., & Hemsworth, D. (2020). E-procurement in small and medium sized enterprises; facilitators, obstacles and effect on performance. *Benchmarking: An International Journal*, 27(2), 839–866. <https://doi.org/10.1108/BIJ-12-2018-0413>

- Schiavo-Campo, S. (2023). *Public Administration: The Basics* (1 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003286387>
- Setyorini, A., & Meiranto, W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penerimaan Dan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Dengan Menggunakan Model Utaut 2 (Studi Empiris Pada Pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Di Kota Salatiga). *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 10, Nomor 1, Halaman 1-15.
- Shareef, M. A., Das, R., Ahmed, J. U., Mishra, A., Sultana, I., Rahman, M. Z., & Mukerji, B. (2024). Mandatory Adoption Of Technology: Can Utaut2 Model Capture Managers Behavioral Intention? *Technological Forecasting And Social Change*, 200, 123087. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.123087>
- Shatta, D. N., & Shayo, F. (2021). The Influence Of Performance Expectancy On e-Procurement Adoption Model In Developing Countries: Tanzanians Perception. *Itegam- Journal Of Engineering And Technology For Industrial Applications (Itegam-Jetia)*, 7(29). <https://doi.org/10.5935/Jetia.v7i29.754>
- Smith, K. B., & Larimer, C. W. (2018). *The Public Policy Theory Primer* (Third Edition). Routledge.
- Soemanagara, R. D. (2019). Persepsi Peran, Konsistensi Peran, Dan Kinerja. *Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, Vol. 3 No.4, 02. <https://doi.org/10.31113/Jia.v3i4.415>
- Solihin, M., & Ratmono, D. (2021). *Analisis Sem-Pls Dengan Warppls 7.0—Untuk Hubungan Non Linier Dalam Penelitian Sosial Dan Bisnis* (1 Ed.). Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=Nbmweaaaqbaj&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>
- Soong, K.-K., Ahmed, E. M., & Tan, K.-S. (2020). Factors Affecting Malaysia's Smes In Using Public Electronic Procurement. *Journal Of Information & Knowledge Management*, 19(02), 2050008. <https://doi.org/10.1142/S0219649220500082>
- Suaryana, I. G. N. A., Noviari, N., & Eka Damayanthi, I. G. A. (2023). Model Adoption Of General Plan Information System Procurement Of Kpa Udayana University (Sirupku). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1875. <https://doi.org/10.24843/Eeb.2023.v12.i09.p19>
- Sugiyono, S. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Edisi Ke-2 Cetakan Ke-6). Alfabeta. 464
- Surat Edaran Kepala Lkpp Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi, Pub. L. No. 4 (2021). <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/surat-edaran-kepala-lkpp/surat-edaran-kepala-lkpp-nomor-4-tahun-2021>
- Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 165/KEP/X/2024 Tentang Person In Charge Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pub. L. No. 165, 6 hlm (2024).

- Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 58/KEP/X/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, Pub. L. No. 58 (2024).
- Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 59/KEP/X/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, Pub. L. No. 59 (2024).
- Susilo, W. D., Partohap, T. H., Rachmawati, S., Alfarisi, D. A., Selawati, B. A., Ariotejo, G. R., Azzahwa, S., & Sumarsono, D. M. (2023). Laporan Survei Penilaian Integritas 2023: Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2023 [Laporan Penelitian Pemerintah]. KPK. <https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=18e1c790>
- Tech for Society. (2021, Oktober 31). Technology and Public Policy: A Look at the Relationship. Tech for Society. <https://www.tec4society.org/post/technology-and-public-policy-a-look-at-the-relationship-with-examples>
- Thai, K. V. (Ed.). (2017). *Global Public Procurement Theories and Practices* (Vol. 18). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-49280-3>
- The World Bank. (2020). How Large is Public Procurement? [Website organisasi internasional]. World Bank Blogs. <https://blogs.worldbank.org/en/developmenttalk/how-large-public-procurement>
- Tiwari, V., & Tripathi, S. (2024). Sampling Designs-Probability and Non-Probability Sampling. Dalam *Research Methodology in Extension Education* by Prakash Laxman Patel, Navaneet Kumar Mishra, Chintawar Shraddha, Dinesh Brijalal Suryawanshi, Shomdutt Tripathi. Elite Publishing House.
- Transparency International. (2024). Corruption Perception Index (2023). Transparency International. www.transparency.org/cpi
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 11 (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pub. L. No. 14 (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>
- Venkatesh, Morris, Davis, & Davis. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *MIS Quarterly*, 27(3), 425. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Wara, L. S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2021). Pengujian Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone Dan Mclean Pada Sistem Aplikasi Pemeriksaan (Siap) Di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 12 (1).
- Wardhana, A. (2023). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Dalam *Teori Administrasi Publik*. Media Sains Indonesia.
- Wardhana, A. (2024). *Teori Organisasi Di Era Digital*. CV. Eureka Media Aksara.
- Widianti, H. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM): Sebuah Pengantar untuk Mahasiswa* (1 ed.). PT. Nasya Expanding Management.

- Yamin, S. (2023). *Olah Data Statistik: SMARTPLS 3, SMARTPLS 4, AMOS & STATA (Mudah &Praktis)*. PT. Dewangga Energi Internasional.
- Yevu, S. K., & Yu, A. T. W. (2019). The ecosystem of drivers for electronic procurement adoption for construction project procurement: A systematic review and future research directions. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 27(2), 411–440. <https://doi.org/10.1108/ECAM-03-2019-0135>
- Younes, E. B., Azizi, O. E., Ouad, F., & Assalih, H. (2022). Study of Impact of Information Technology On the Organizational Performance of Moroccan Public Higher Education Institutions. *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering*, 08(04), 21–28. <https://doi.org/10.31695/IJASRE.2022.8.4.3>
- Yudharini, S., Saleh, C., & Pratiwi, R. N. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Electronic Procurement terhadap Kinerja pada Bagian Pengadaan Universitas Brawijaya. 7 No 2, 210–215.
- Zulkarnain, Z., Muda, I., & Kesuma, S. A. (2023). Factors Determining The Adoption of E-Procurement in Developing Countries: A Systematic Literature Review. *International Journal of Social Service and Research*, 3(2), 585–594. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i2.281>